



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 168 TAHUN 2024

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2024


**RI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 168 TAHUN 2024

TENTANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2024

A. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1.	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan				Indeks Kota Layak Huni	71	Indeks
		1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas		Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	77,24	Persen
		2.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit		Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	20,97	Persen
		3.	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,43	Indeks
				2)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	25,4	Persen
4.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota		Indeks Risiko Bencana	59,66	Indeks		
2.	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	7,81	Indeks
		5.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,8-5,6	Persen

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
		6.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	6,53	Persen
		7.	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1)	Rasio Gini	0,410	Koefisien
	2)			Tingkat Kemiskinan	3,79	Persen	
	3)			Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,5	Persen	
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	4,01	Indeks
3.	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan				Indeks Pembangunan Manusia	83,55	Indeks
		9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat		Indeks Dimensi Pendidikan	12,16	Tahun
		10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1)	Angka Harapan Hidup	75,81	Tahun
				2)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	13,2	Persen
		11.	Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender		Indeks Pembangunan Gender	95,14	Indeks
		12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat		Indeks Demokrasi	82,13	Indeks
4.	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas				Indeks Reformasi Birokrasi	83	Indeks
		13.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,08	Indeks

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
		14.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21	Indeks
		15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1)	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 (A)	Predikat
				2)	Indeks Survei Penilaian Integritas	75	Indeks
		16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Opini
		17.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur		Indeks Sistem Merit	350,5	Indeks

B. PROGRAM, ANGGARAN DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.367.299.299	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	540.978.067.471	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3.	Program Pengelolaan Kecamatan	2.569.365.412.073	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	14.693.024.808	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	608.407.970		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.752.196.664		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.880.829.888		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	17.109.494.492		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	153.883.491.086		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	746.716.329.051		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	473.219.552.144		Sekretariat DPRD
12.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.507.510.483		Biro Hukum
13.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	188.344.196	1.	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
			2.	Biro Perekonomian dan Keuangan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
14.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	6.940.691.102		Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
15.	Program Kesejahteraan Rakyat	350.825.480.298	1.	Biro Kesejahteraan Sosial
			2.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
16.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	81.827.983.378	1.	Biro Kerja Sama Daerah
			2.	Biro Pemerintahan
17.	Program Penataan Organisasi	35.680.233.343	1.	Biro Kerja Sama Daerah
			2.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
18.	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.606.182.900	1.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
			2.	Biro Perekonomian dan Keuangan
19.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	53.934.431.002		Inspektorat
20.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	17.043.329.533		Inspektorat
21.	Program Kepegawaian Daerah	45.656.041.369	1.	Badan Kepegawaian Daerah
			2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
22.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.509.672.562		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.169.253.050		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	96.819.473.285	1.	Badan Pengelolaan Aset Daerah
			2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
25.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.692.689.141.104		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
26.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	221.965.291.888		Badan Pendapatan Daerah
27.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.439.525.772		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	24.412.149.723		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	142.021.356		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
30.	Program Pemasaran Pariwisata	73.132.762.705		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
31.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	588.914.786		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
32.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.024.770.580		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
33.	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	17.699.999.922		Dinas Sumber Daya Air
34.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	348.131.101		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
35.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	7.576.671.509		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
36.	Program Pengelolaan Hutan	30.056.130.246		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
37.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.731.890.068		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
38.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	6.870.974.454		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
39.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.273.899.684		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
40.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.976.472.238		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
41.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	38.436.999.815		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
42.	Program Pengembangan Ekspor	6.115.532.175		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
43.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.024.141.910		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
44.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	979.433.720		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
45.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	9.807.749		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
46.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.595.050.445		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
47.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	29.786.217.179		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
48.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7.866.536.227		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
49.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	86.929.946.945		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
50.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.642.187.894		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

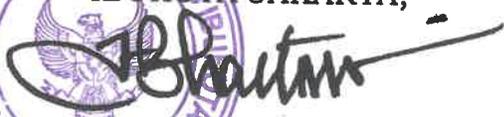
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
51.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.134.741.265		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
52.	Program Penyuluhan Pertanian	11.696.361.289		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
53.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	65.587.797.475		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
54.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	254.161.378		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
55.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	7.871.097.189		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
56.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	705.798.455		Dinas Kesehatan
57.	Program Pemberdayaan Sosial	19.473.052.798		Dinas Sosial
58.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.559.563.847.597		Dinas Kesehatan
59.	Program Penanganan Bencana	28.512.532.406	1.	Dinas Sosial
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
60.	Program Penanggulangan Bencana	84.782.697.952		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
61.	Program Penataan Bangunan Gedung	943.374.082.609		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
62.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	346.684.822.172		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
63.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	680.148.129.002		Dinas Sumber Daya Air
64.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	907.767.487.599		Dinas Sumber Daya Air
65.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.540.920.956		Dinas Sumber Daya Air
66.	Program Pengelolaan Pendidikan	9.172.910.258.852		Dinas Pendidikan
67.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.696.027.024.358		Dinas Sumber Daya Air
68.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	482.830.886		Dinas Bina Marga
69.	Program Pengembangan Perumahan	445.206.954.424		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
70.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.630.370.390.539		Dinas Kesehatan
71.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	264.135.935.008		Satuan Polisi Pamong Praja
72.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	419.513.849.705		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
73.	Program Penyelenggaraan Jalan	1.775.593.930.615	1.	Dinas Bina Marga
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
74.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	135.660.508.627		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
75.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	860.792.291.786		Dinas Sosial
76.	Program Rehabilitasi Sosial	290.816.255.506		Dinas Sosial
77.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	384.467.544		Dinas Kesehatan
78.	Program Hubungan Industrial	2.089.165.000		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
79.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	90.960.049.241		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
80.	Program Pelayanan Penanaman Modal	144.846.916.306		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
81.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	13.321.906.121		Dinas Kebudayaan
82.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	890.107.782		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
83.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.844.110.457		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
84.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	654.077.501		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
85.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	468.217.958.592		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
86.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	65.139.768.551		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
87.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.665.258.298		Dinas Lingkungan Hidup
88.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.432.806.602		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
89.	Program Pembinaan Perpustakaan	104.177.005.787	1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
90.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.076.394.905		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
91.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	648.084.872		Dinas Lingkungan Hidup
92.	Program Penatagunaan Tanah	2.563.377.046		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
93.	Program Pencatatan Sipil	6.254.522.640		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
94.	Program Pendaftaran Penduduk	63.757.787.697		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
95.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.000.250.643		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
96.	Program Penempatan Tenaga Kerja	30.746.444.121		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
97.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.284.740.730		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
98.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	7.800.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
99.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.866.106.653		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
100.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.422.020.180		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
101.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	574.168.614.157		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
102.	Program Pengelolaan Arsip	21.752.478.137	1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
103.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.399.505.340		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
104.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.174.981.201		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
105.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	62.553.786.427		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
106.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	895.343.065.328	1.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
107.	Program Pengelolaan Pelayaran	47.336.081.430		Dinas Perhubungan
108.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.939.602.119		Dinas Perhubungan
109.	Program Pengelolaan Permuseuman	61.189.878.816		Dinas Kebudayaan
110.	Program Pengelolaan Persampahan	2.962.068.624.800		Dinas Lingkungan Hidup
111.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	328.156.506		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
112.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	7.855.000		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
113.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	719.769.525.025	1.	Dinas Pemuda dan Olahraga
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
114.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.390.606.032		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
115.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	22.879.897.726	1.	Dinas Pemuda dan Olahraga
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
116.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4.667.218.454	1.	Dinas Pemuda dan Olahraga
			2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
117.	Program Pengembangan Kebudayaan	109.155.517.838		Dinas Kebudayaan
118.	Program Pengembangan UMKM	233.596.279		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
119.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.824.494.835		Dinas Lingkungan Hidup
120.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.794.386.163		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
121.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	67.950.929.546		Dinas Lingkungan Hidup
122.	Program Pengendalian Penduduk	8.596.093.683		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
123.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	795.188.175.882		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
124.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.196.817.540		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	NO.	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
125.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	5.125.402.333		Dinas Lingkungan Hidup
126.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.399.180.623.948		Dinas Perhubungan
127.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	8.514.626.840		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
128.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.110.929.674		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
129.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.434.537.918		Dinas Lingkungan Hidup
130.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	105.718.590		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
131.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.028.221.547		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
132.	Program Perlindungan Perempuan	17.299.716.644		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
133.	Program Promosi Penanaman Modal	9.473.642.465		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO